BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo dan Wirawan : 2001). Dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, Pemerintah mencanangkan Anggaran Pemerintah setiap tahunnya. Dimana anggaran tersebut dialokasikan pada setiap pengeluaran yang ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Sumber dana yang didapatkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dirancang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Menurut APBN sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2010 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 729,2 triliun yang kurang lebih merupakan 70% dari penerimaan APBN tahun 2010. (dikutip dari pidato presiden RI dalam pidato kenegaraan: http://warungmassahar.blogspot.com)

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi sebuah kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pajak pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi serta sarana lain di biayai, serta pembiayan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pajak merupakan iuran wajib kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dalam prosesnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia beberapa diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan lain-lain.

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Termasuk salah satu diantaranya adalah kasus PT. Kaltim Prima Coal yang diduga menunggak pajak hingga Rp 1,5 triliun, yang hingga kini masih terus diproses oleh Dirjen Pajak. (dikutip dari : http://berita.liputan6.com)

Serangkaian tindakanpun dilakukan untuk mengatasi tunggakan pajak, yang diantara prosesnya dapat dilakukan dengan surat paksa. Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2000 “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Di mata hukum surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel 1.1 memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan surat paksa, tunggakan pajak dan pencairan/ pelunasan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2007 sampai dengan 2009. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi problema penagihan dengan tunggakan yang cenderung meningkat.

Tabel 1.1
Perkembangan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas
Periode 2007 - 2009

(dalam rupiah)

Tahun	Triwulan	Penerbitan Surat Paksa	Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa	Pelunasan Tunggakan	Saldo Tunggakan
2007	I	220	Rp997,437,109	Rp966,914,977	Rp20,536,546,132
	II	220	Rp2,513,464,970	Rp91,965,393	Rp22,958,045,709
	III	62	Rp260,034,557	Rp459,475,909	Rp22,758,604,357
	IV	26	Rp239,422,762	Rp120,659,781	Rp22,877,367,338
2008	I	267	Rp235,177,616	Rp1,393,222,998	Rp21,719,321,956
	II	256	Rp296,352,680	Rp194,660,277	Rp21,821,014,359
	III	241	Rp280,842,265	Rp53,086,979	Rp22,048,769,645
	IV	206	Rp168,447,328	Rp118,634,937	Rp22,098,582,036
2009	I	79	Rp83,272,289	Rp179,367,277	Rp22,002,487,048
	II	250	Rp7,045,387,614	Rp82,545,213	Rp28,965,329,449
	III	230	Rp1,142,198,411	Rp21,608,535	Rp30,085,919,325
	IV	166	Rp793,839,698	Rp327,430,171	Rp30,552,328,852

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Data Diolah

Jika dilihat perubahan tunggakan pajak tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang fluktuatif, dengan pelaksanaan penagihan menggunakan surat paksa yang cukup progresif. Namun masih perlu adanya peningkatan pada pelunasan atas tunggakan pajak yang tercatat pada seksi penagihan. Berdasarkan data di atas, dapat terlihat terdapat problema atas jumlah tunggakan pajak yang tiap triwulannya cenderung mengalami peningkatan.

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak. Dengan demikian penelitian ini penulis beri judul " **Pengaruh Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas** ".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada adalah masih banyak terdapat wajib pajak yang menunggak pajak terutang, sehingga dilakukan serangkaian tindakan oleh Dirjen Pajak yang termasuk didalamnya dengan menggunakan surat paksa.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas
2. Bagaimana perkembangan pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas
3. Seberapa besar pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui perkembangan pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1. Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas memberikan informasi mengenai pengaruh penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak.
2. Bagi Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas memberikan informasi tentang efisiensi surat paksa dalam pelunasan pajak, sehingga dapat digunakan secara intensif di lapangan.

b. Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen, memberikan referensi tentang keterkaitan antara pemberian surat paksa dengan pelunasan tunggakan pajak.
2. Bagi Peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.
3. Bagi Peneliti, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pemberian surat paksa dengan pelunasan tunggakan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dimana penulis memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas. Waktu penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Bulan														
		Maret				April				Mei				Juni		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1	Persiapan Pendahuluan															
2	Penulisan Usulan Penelitian															
3	Pengumpulan Data															
4	Pengolahan Data															
5	Penulisan Laporan															